

## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM KEUANGAN DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Muhammad Wahyu Miftah Juandi<sup>1</sup> dan Reza Muhammad Rizqi\*

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia  
[reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id](mailto:reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Moyo Hulu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik *sampling* diambil dengan cara *purposive sampling*, sehingga mendapatkan sejumlah 72 orang sebagai responden, 48 dari aparatur desa dan 24 dari auditor inspektorat. Teknik analisis datanya menggunakan metode analisis SEM dengan *smartPLS* versi 4.0. Dimana berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci;** Kompetensi Aparatur Desa; Sistem Keuangan Desa; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine and analyze the influence of village apparatus competency, village financial system and government internal control system on accountability in village fund management in Moyo Hulu District. This type of research is quantitative. The sampling technique was taken using purposive sampling, so that 72 people were obtained as respondents, 48 people from village officials and 24 people from inspectorate auditors. The data analysis technique uses the SEM analysis method with smartPLS version 4.0. Based on the results of the analysis, it shows that the competence of village officials and the village financial system do not have a significant effect on the accountability of village fund management, while the government's internal control system has a significant effect on the accountability of village fund management.*

**Keywords;** Village Apparatus Competence; Village Financial System; Government Internal Control System; Accountability for Village Fund Management.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pemerintahan daerah diberikan pelimpahan tugas dan kuasa oleh Pemerintah pusat untuk mengelola wilayahnya masing-masing atau sering disebut dengan istilah desentralisasi. Salah satu bentuk desentralisasi atau pelimpahan tugas dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah kepada Desa (Maryadi, 2023). Menurut Permendes No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, fokus utamanya adalah program-program pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dengan disahkannya UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa menjadi tonggak utama dalam hal pembangunan

dan diberi wewenang yang lebih besar daripada sebelumnya. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman untuk memberikan dana langsung dari APBN untuk desa, yang nantinya di kelola oleh desa dengan mandiri dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Pemerintah pusat kini serius untuk meningkatkan derajat perekonomian Indonesia dalam hal pembangunan terutama di tingkat desa, misalnya adanya program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat dari meningkatnya alokasi dana desa yang dianggarkan tiap tahunnya cukup besar. Ditahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar 20,7 triliun, kemudian meningkat ditahun 2016 menjadi 40,98 triliun, dan ditahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 60 triliun dari APBN. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 70 triliun dan untuk tahun 2020 dan 2021 naik sebesar 2 triliun dari tahun 2019 menjadi 72 triliun dan ditahun 2022 alokasi dana desa menjadi



Gambar 1. Jumlah Pagu Anggaran Dana Desa

68 triliun (Kementerian Keuangan, 2022).

Besarnya anggaran yang diterima pemerintah desa harus dapat menunjukkan dengan jelas akuntabilitasnya kepada Pemerintah Pusat dan kepada masyarakat pada umumnya (Indraswari & Rahayu, 2021). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan atau memberikan respon secara nyata berupa kualitas kinerja kepada yang berwenang. Suatu serangkaian susunan akuntansi dapat menghasilkan informasi yang tepat dan bisa diandalkan serta tepat pada waktunya juga dapat dimaknai sebagai akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas sebagai dasar tata pengelolaan pemerintahan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat mengenai program dan kebijakan pemerintah (Aziiz & Prastiti, 2019).

Sehubungan mengenai hal tersebut, pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, membuat laporan, dan mengemukakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan aset dan sumber daya. kepada pemberi mandat. Oleh karenanya, untuk mengelola keuangan dana desa, pemerintah desa harus berlandaskan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

(Martini dkk., 2019). Hal ini dikarenakan pemerintah desa bertanggungjawab terhadap publik. Akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan keputusan dan kinerja seseorang atau organisasi kepada pihak lain. Namun, dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa yang terus berlanjut, hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terpenuhi (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023)

Terjadinya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap dana desa harus ditekan dengan menerapkan sistem tertentu yang dapat dijadikan alat pencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut, misalnya dengan Sistem Keuangan Desa atau lebih dikenal dengan SISKEUDES (Eprilsa & Budiwitjaksono, 2022). Pengembangan (SISKEUDES) oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) adalah salah satu langkah untuk menekan terjadinya kasus penyelewengan dana desa dan juga dapat membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. SISKEUDES dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur yang bertanggungjawab dalam hal mengelola keuangan/dana desa. Kualitas Informasi dan Kualitas Pelayanan merupakan capaian penerapan SISKEUDES, yang telah meningkatkan kepuasan penggunaanya selama proses pembuatan laporan keuangan (Pratama & Amalia, 2019). Dengan demikian, keberadaan SISKEUDES sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mengoptimalkan hasil.

Menurut Aziiz & Prastiti (2019), prinsip yang tidak jauh pentingnya didalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah desa adalah menerapkan sistem pengendalian internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan pemerintahan desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas, dijalankan dengan baik, terorganisir, efisien, dan efektif (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023). Kehadiran sistem pengendalian internal sangat penting karena keberadaannya yang tepat dapat berdampak besar pada kemampuan pemerintah desa untuk membuat keputusan internal serta dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) mengatakan bahwa SPIP memiliki fungsi yang sangat krusial dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan kewajiban dalam pertanggungjawabannya, baik dalam hal memberikan jaminan maupun memberikan saran konsultasi. Menurut PP No.60 Tahun 2008, Inspektorat bertanggung jawab atas pengawasan internal terhadap penerapan peran dan tanggung jawab dari instansi pemerintah (BPKP, 2008). Ini mencakup bimbingan dalam penerapan SPIP dan pemantauan akuntabilitas keuangan negara. Saat ini, penerapan SPIP di pemerintah desa sama pentingnya dengan penerapan SPIP di pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa desa harus mempunyai kapasitas dalam hal mengatur dan mengelola dana yang pemerintah pusat telah berikan (Martini dkk., 2019). Pemerintah desa wajib

melaksanakan serangkaian kegiatan yang taat aturan dengan mewujudkan pengendalian intern sehingga maksimalnya kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat pun ikut tercapai.

Faktor lainnya guna terjaminnya akuntabilitas dalam mengelola dana desa adalah diperlukan aparatur desa yang kompeten sebagai pengelola dana desa, sehingga akuntabilitas mampu diterapkan dengan efektif. Untuk menciptakan dan meningkatkan kompetensi maka diperlukan pelatihan, pendidikan dan pengalaman dari aparatur desa agar mampu menerapkan akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan dana desa (Aziiz & Prastiti, 2019). Aparat desa juga harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan tujuan organisasi. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel (Martini dkk., 2019).

Pengelolaan keuangan desa tidak akan lepas dari akuntabilitas, dikarenakan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat dan terkhususnya kepada masyarakat desa (Fitriyana, 2022). Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, bersamaan dengan itu meningkat pula kasus penyalahgunaan dan penggelapan dana samapai sekarang, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa tidak dapat terlaksana secara maksimal (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023). Berdasarkan data dari KPK, dari tahun 2015 hingga 2022 terdapat 975 aparatur desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena melakukan penyalahgunaan dana desa (KPK, 2022). Sementara di kabupaten Sumbawa, penyalahgunaan dana desa setidaknya telah terjadi di beberapa desa. Dilansir dari *Kompas.com* (21/8/2022) penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa terjadi di desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano pada tahun 2022, yang menyebabkan kerugian negara mencapai 170 juta rupiah. Kasus serupa juga pernah terjadi di Desa Tengah Kecamatan Utan, Desa Sukamulia Kecamatan Labangka, dan juga di Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, dimana pelakunya merupakan oknum kepala desa yang kemudian diberhentikan secara bersamaan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa (Pulau Sumbawa News, 2019). Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan melakukan penelitaian adalah untuk mengkaji dan menganalisis: **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

Untuk menjawab tujuan penelitian diatas, rujukan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan teori *stewardship*. Pandangan *stewardship* menyatakan bahwa manusia harus hidup dalam kelompok dan bekerja sama (Prasetyantoko, 2008). Dimana *steward* (manajer) yang dimotivasi oleh hasil kepentingan entitas daripada kebutuhan individu (Donaldson & Davis, 1991).

Pada penelitian ini, teori *stewardship* diterapkan guna menerangkan bahwa pemerintah desa (*steward*) harus menggunakan semua kemampuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas serta kejujuran agar kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah desa dalam peran pengelola (*steward*) harus memiliki kapasitas untuk menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

### **Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi Aparatur Desa yaitu kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam suatu organisasi yang didasarkan pada dua kemampuan, yaitu kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Menurut Fajri & Julita (2021) menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa yang berkualitas, dapat mendorong pengelolaan dana desa mencapai akuntabilitas. Sehingga, agar tercapainya tujuan dari organisasi, pemerintah desa sebagai *steward* sangat memerlukan kompetensi. Selaras dengan riset yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020), juga penelitian Atiningsih (2019), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### **SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Sistem keuangan desa mencakup segala transaksi di desa, yang nantinya dicatat sebagai bukti dan pelaporan keuangan, yang kemudian didapatkan *output* berupa laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait dalam administrasi fungsi desa.. Menurut Ayem & Fitriyaningsih (2022), sistem keuangan desa dapat membantu menjalankan semua aspek pengelolaan dana desa, dari perencanaan hingga pengawasan, secara efektif dan akuntabel. Selaras dengan teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dapat dicapai melalui kinerja yang cepat dan tepat. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes ini berkontribusi pada memudahkan pengelola organisasi dan memudahkan pencapaian tujuan organisasi agar dapat menunaikan tanggungjawabnya. Siskeudes dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna karena fitur sistem yang sederhana. Pengaplikasian Siskeudes akan membantu aparatur desa mengelola dana dengan sederhana dan memungkinkan pengungkapan keuangan yang menyeluruh untuk mengurangi penyimpangan dan penggelapan. Oleh karena itu, keberadaan SISKEUDES sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan

mengoptimalkan hasil. Selaras dengan hasil penelitian Tiarno & Budiwitjaksono (2023), dan penelitian Arfiansyah (2020), yang menyatakan bahwa SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

H2: Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### **SPIP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

SPIP digunakan agar mampu mewujudkan kepercayaan yang memadai agar tujuan dari organisasi dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang berlandaskan prinsip efisien dan efektif, andal serta taat terhadap peraturan. Sistem tersebut memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memantau keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa agar sesuai dengan tujuan dari pembangunan desa dan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan teori *Stewardship*, masyarakat desa memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa (Steward) untuk bertanggungjawab menunaikan kewajibannya agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Oleh karena itu, sebagai *Steward*, pemerintah desa wajib menciptakan serangkaian kegiatan yang baik melalui pengendalian internal sehingga kinerja organisasi dapat dilihat oleh khalayak ramai dan menghadirkan keputusan di tengah masyarakat. Selaras dengan riset yang pernah dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020), Arfiansyah (2020), Adnyana (2022), dan penelitian Atiningsih (2019) yang mengatakan bahwa pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3: Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah model tertutup dan pengukurannya menggunakan skala likert dengan nilai skala 1-4. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah seluruh aparatur desa sekecamatan Moyo Hulu yakni sebanyak 84 aparatur desa dan seluruh pegawai inspektorat kabupaten Sumbawa sebanyak 60 orang. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria: pertama, aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa; dan kedua, auditor inspektorat. Sehingga didapatkan sebanyak 72 responden. Teknik analisis datanya menggunakan metode analisis SEM dengan *smartPLS* versi 4.0.

**PEMBAHASAN**

**1. Model Pengukuran atau Outer Model**

Ada beberapa uji yang dapat dilakukan pada model pengukuran, yakni: Pertama, Uji *Convergent Validity*, indikator dianggap valid dengan melihat seluruh nilai *outer loading*, dan nilai muatan harus lebih besar dari 0,6 atau memiliki nilai AVE diatas 0,6. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai dari *outer loading* telah memenuhi sehingga hasil uji bisa dikatakan valid. Kedua, uji *Discriminant validity*, dilihat berdasarkan nilai *cross loading*, indikator dianggap valid dengan melihat seluruh nilai *outer* dan nilai muatan harus lebih besar dari 0,6 atau memiliki nilai AVE diatas 0,6. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai dari *outer loading* telah memenuhi sehingga hasil uji dikatakan valid. Ketiga, yaitu uji *Composit Reliability*, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composit Reliability*, batas nilai yang diterima pada uji *Composit Reability* adalah >0,7. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai dari *Cronbach's Alpha* dan *Composit Reliability* telah memenuhi sehingga hasil uji dapat dikatakan valid.

**2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

Evaluasi model strukturat dapat dilakukan dengan melihat hasil *R-Square (R<sup>2</sup>)*

Tabel 1 R-Square

	R-Square	Adjusted R-square
Akuntabilitas	0.667	0.652

Nilai R-Square adalah 0,667 (sedang), maka nilai tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi, SISKEUDES dan SPIP berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas besarnya 66,7% sedangkan sisasanya besarnya adalah 33,3% dipengruhi oleh faktor lain.

**3. Pengujian Hipotesis**

Tabel 2 *Bootsraping*

Bootstraping	Sampel Asli	T-statistic( O/STDEV )	Nilai P (P-value)
Kompetensi->Akuntabilitas	0.259	1.536	0.125
SISKEUDES->Akuntabilitas	0.076	0.641	0.522
SPIP->Akuntabilitas	0.563	4.607	0.000

**a) H1: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis, konstruk Kompetensi terhadap Akuntabilitas memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,125 dan sebesar *T-Statistik* senilai 1,536, maka H0 diterima dan H1 ditolak karena *P-Value* lebih besar dari 0,05 dan *T-Statistik* lebih kecil dari 1,96. Demikian disimpulkan variabel konstruk Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**b) H2: Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Berdasarkan hasil pengujian, variabel konstruk SISKEUDES terhadap Akuntabilitas dan nilai *P-Value* senilai 0,522 dan memiliki sebesar *T-Statistik* sebesar 0,641, maka H0 diterima dan H1 ditolak karena *P-Value* lebih besar dari 0,05 dan *T-Statistik* lebih kecil dari 1,96. Demikian disimpulkan variabel konstruk Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**c) H3: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Berpengaruh dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian, variabel konstruk SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan hasil *T-Statistik* sebesar 4,607 dan *P-Value* senilai 0, serta original sampel senilai 0,563, maka H1 diterima dan H0 ditolak karena *T-Statistik* lebih besar dari 1,96 dan *P-Value* kurang dari 0,05 serta original sampel bernilai positif. Demikian

disimpulkan variabel konstruk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Namun, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Saran untuk aparatur desa selaku garda terdepan dalam pengelola dana desa agar dapat meningkatkan kompetensinya. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dan luas agar hasil yang didapatkan lebih akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyana, I. G. P. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 48-61.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Eprilsa, S. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 748-757.
- Fahera, G. I., & Satyawan, M. D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5193-5201
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Fitriyana, F. R. N. (2022). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

- Lamo, A. (2015). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance. *Yogyakarta: CV. Budi Utama*.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Maryadi, G. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Unter Iwes
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Pratama, V., & Amalia, R. (2019). Analisa Kesseuksesan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Model Delone Dan Mclean (Studi Kasus: Kabupaten Ogan Komering Ilir). In *Bina Darma Conference on Computer Science (BDCCS)* (Vol. 1, No. 6, pp. 2383-2393).
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596-1608.